

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengelola pemerintahan secara lebih luas setelah diberlakukannya otonomi daerah. Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah mengelola keuangan yang digunakan untuk melakukan pembangunan di daerah melalui berbagai instansi pemerintahan yang ada. Kinerja instansi pemerintah saat ini menjadi salah satu sorotan setelah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang penyelenggaraan administrasi publik. Instansi pemerintah sering dinilai oleh masyarakat sebagai tempat pemborosan dan tidak efisien dalam mengelola keuangan. Masyarakat menuntut adanya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah.

Akuntabilitas publik berisikan suatu kewajiban yang harus dipenuhi untuk melakukan pengelolaan sumber daya, pelaporan, dan pengungkapan segala aktivitas dan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan sumberdaya publik kepada pihak pemberi kepercayaan. Akuntabilitas memberikan tempat bagi publik untuk ikut serta dalam proses pemerintahan dan pembangunan Dewi & Hadiprajitno, (2023).

Akuntabilitas merupakan alat pengawasan pencapaian hasil dari pelayanan publik yang dapat memastikan keefektifan dan keefisienan pengelolaan anggaran. Skripsi ini mendeskripsikan pelayanan publik

diberikan kepada masyarakat berkat pendanaan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Oleh karena itu, akuntabilitas kepada masyarakat harus dijalankan dan konsep pengukuran kinerja harus diterapkan. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai tanggung jawab organisasi dan manajer dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Pengukuran kinerja merupakan dasar evaluasi kinerja, yaitu menilai berhasil tidaknya suatu program dan kegiatan organisasi Yaman (2021). Setelah kewajiban tersebut terpenuhi, maka dapat diketahui apakah pengelolaan keuangan yang dilakukan sudah dijalankan secara baik atau belum baik. Sehingga akan tercipta keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan masyarakat bisa menilai kinerja keuangan dari suatu instansi pemerintahan.

Pengukuran kinerja keuangan dalam hubungannya dengan hasil kegiatan operasional pemerintahan merupakan suatu keharusan untuk dikaji. Hasil kerja atau *output* dari kegiatan operasional pemerintah berupa pembangunan infrastruktur dan pelayanan public tentu akan menunjukkan seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja dari pihak pemerintah. Tingkat penilaian masyarakat dilihat dari ketersediaan infrastruktur yang telah disediakan oleh pemerintah apakah infrastruktur yang ada sudah mampu mengatasi kekurangan yang terjadi di masyarakat atau tidak. Ketersediaan infrastruktur tentunya diberikan oleh pemerintah untuk menanggulangi dan melancarkan mobilitas yang ada pada masyarakat, seperti pembangunan jalan aspal, jembatan, irigasi dan

pembangunan pemukiman penduduk serta fasilitas publik lainnya. Penilaian masyarakat disini mampu menunjukkan seberapa besar tingkat ekonomis, efisien dan efektivitas pemerintah dalam mengelola dan menggunakan anggaran yang sudah disediakan untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Pembangunan daerah sangatlah penting dilakukan untuk memajukan suatu daerah, melalui pembangunan berbagai infrastruktur seperti jalan, fasilitas umum dan fasilitas penunjang lainnya. Pembangunan di Kabupaten Pacitan dilakukan oleh instansi yang bernama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui berbagai program Pembangunan yang dijalankan. Daerah Kabupaten Pacitan sebagian besar bergunung-gunung dan berupa karst yang menyebabkan ketersediaan air/sumber air baku menjadi terbatas. Kekeringan sering terjadi ketika memasuki musim kemarau dan menyebabkan masyarakat di beberapa daerah Kabupaten Pacitan kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air sehari hari. Kelembagaan pengelola air di perdesaan sebagian belum optimal sehingga perlu dikelola lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memberikan pelayanan berupa program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Pacitan. Kegiatan yang dilakukan berupa mencari sumber air, waduk, dan sungai baru yang dapat menyediakan air minum. Penguatan konservasi air untuk melestarikan

sumber daya air dan meningkatkan partisipasi masyarakat, BUMDES, CSR dalam pembangunan dan pengembangan sarana air bersih.

Dinas PUPR Kabupaten Pacitan mempunyai sejumlah program operasional, antara lain program pengembangan dan pengelolaan sistem air minum tahun 2021 sebesar Rp 6.684.452.939,00 dan tahun 2022 sebesar Rp 9.546.719.965,00. Pemerintah daerah, sebagai penyelenggara layanan publik, memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola sumber daya keuangan dengan efisien dan efektif. Salah satu tujuan utama pemerintah adalah memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat sambil memastikan bahwa dana publik digunakan dengan tepat dan memberikan manfaat yang maksimal. Oleh karena itu, konsep *Value for Money* menjadi sangat relevan dalam konteks ini, karena mengukur efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dinas pemerintah.

Konsep *Value for Money* menurut (Mardiasmo, 2010) dalam Prasetyo et al., (2022) berisi tiga aspek yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Aspek ekonomi berkaitan dengan pengadaan sumber daya atau barang/jasa dengan biaya yang paling efisien. Aspek efisiensi berkaitan dengan sejauh mana sumber daya yang digunakan telah dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efektivitas mengukur sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Artinya, penggunaan sumber daya harus menghasilkan hasil atau manfaat yang diharapkan.

Menurut Mardiasmo (2018:4) *Value for Money* adalah konsep manajemen organisasi sektor publik berdasarkan tiga faktor utama: ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi adalah perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah. Ekonomi mengacu pada sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalkan sumber daya yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Efisiensi melibatkan pencapaian keluaran maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sederhananya, efisiensi adalah perbandingan outcome dengan output.

Berdasarkan fenomena diatas, dinas PUPR terdapat program kerja salah satunya Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sehingga peneliti tertarik akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Kegiatan Dinas Menggunakan Konsep *Value for Money* Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2022”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan dari konteks permasalahan di atas, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah hasil keuangan kegiatan Dinas PUPR Kabupaten Pacitan tahun 2021-2022 sudah berjalan secara ekonomi, efisiensi dan efektivitas jika diukur dengan konsep *Value for Money*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kinerja keuangan pada kegiatan Dinas PUPR Kabupaten Pacitan tahun 2021-2022 sudah berjalan secara ekonomi, efisiensi dan efektivitas jika diukur dengan konsep *Value for Money*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Instansi

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat meningkatkan akuntabilitas pelaporan kinerja keuangan yang dimiliki dan untuk meningkatkan pelayanan terhadap Masyarakat umum.

2. Bagi Akademik

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini bagi dunia akademik adalah sebagai bahan literasi dan referensi bagi pihak yang ingin mempelajari lebih lanjut pokok permasalahan yang serupa.